

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan peneliti tentang “Analisis Faktor -faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, dengan data panel didapatkan *Fixed Effect Model* menggunakan aplikasi Eviews 12 maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendidikan di Indonesia tahun 2015-2022.
2. Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendidikan di Indonesia tahun 2015-2022.
3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendidikan di Indonesia tahun 2015-2022.
4. Pengeluaran Rumah Tangga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendidikan di Indonesia tahun 2015-2022.
5. Ketimpangan Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2015-2022.

A. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian ini, maka implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi-provinsi di seluruh Indonesia harus lebih memperhatikan dalam masalah perkembangan jumlah penduduk di daerah masing-masing provinsi Indonesia dengan melakukan penyuluhan program Keluarga Berencana (KB) lebih optimal. Program Keluarga Berencana (KB) akan memberikan wawasan kepada masyarakat akan tingginya biaya yang dikeluarkan dalam kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan bagi anak. Selain itu pemerintah harus lebih mengarahkan kepada masyarakat untuk program satu atau dua anak lebih cukup agar menciptakan keluarga yang berkecukupan dan menjadikan setiap anak di keluarga dapat mencapai pendidikan yang berkualitas.

2. Penduduk di tiap daerah provinsi Indonesia diharapkan lebih memperhatikan pendidikan anaknya dengan meningkatkan kontribusi untuk pendidikan anak yang lebih layak. Peningkatan pengeluaran tersebut dapat berkontribusi dalam perbaikan mutu pendidikan sehingga angka ketimpangan pendidikan dapat menurun. Namun pemerintah daerah juga diharapkan ikut serta dalam kontribusi ini dengan mengoptimalkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membantu rumah tangga untuk meningkatkan pendidikan anak. Dalam program pemerintah 12 tahun wajib belajar tidak sepenuhnya membebaskan siswa dari semua sumbangan biaya. Biaya yang tidak didanai pemerintah harus ditanggung oleh pengeluaran rumah tangga.
3. Pemerintah daerah di seluruh provinsi Indonesia harus memperhatikan wilayah/daerah mereka yang memiliki ketimpangan pendidikan tinggi dengan memaksimalkan program 12 tahun wajib belajar terutama untuk daerah-daerah yang tertinggal seperti provinsi Papua yang penduduknya rata-rata hanya tamat SD. Selain itu, pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan ketimpangan pendidikan yang terjadi di daerah yang memiliki ketimpangan pendidikan tinggi. Diharapkan pemerintah daerah seluruh provinsi Indonesia lebih fokus lagi dalam membangun kualitas pendidikan dengan memperhatikan kualitas pendidikan, sarana prasarana atau membuat kebijakan baru dalam pengalokasian dana pendidikan. Selain itu, dalam menjalankan program peningkatan mutu pendidikan pemerintah mampu mendistribusikan pendidikan dengan merata pada setiap wilayah agar tidak terjadi ketimpangan antar wilayah.
4. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mengkaji kembali penelitian ini dengan menggunakan variabel lainnya untuk diteliti dan metode analisis yang berbeda agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.